V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah didapat berdasarkan data dan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan, penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu para informan terklarifikasi berdasarkan beberapa kategori yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan informasi mengenai Pemberdayaan Masyarakat oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir. Peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah didapat pada saat penelitian berlangsung. Kemudian hasil temuan-temuan di lapangan yang berhasil diperoleh dari hasil penelitian akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, pemberdayaan sebagai tujuan menurut Suharto (2010) digunakan sebagai pendekatan untuk memahami strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir di pesisir Kota Bandar Lampung.

Dalam Bab ini peneliti akan menjawab tiga rumusan masalah yang kemudian diturunkan pada fokus penelitian, yaitu:

1. Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir meliputi:
   a. Strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah
   b. Strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove

2. Hasil yang telah tercapai dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Jaringan perempuan Pesisir, dengan indikator yaitu:
   a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
   b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
   c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir
   a. Faktor Internal
   b. Faktor Eksternal

1. Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir

Pengelolaan lingkungan hidup terutama kawasan pesisir merupakan salah satu fenomena hangat yang sering menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan (akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup). Mereka menilai pengelolaan lingkungan pesisir perlu dilakukan demi keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini kepentingan ekologi dan sosial ekonomi masyarakat menjadi hal penting yang patut dipertimbangkan guna menciptakan keseimbangan antara kelestarian dan kesejahteraan demi keberlangsungan hidup masyarakat disekitarnya.

Demi tercapainya dua hal tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mewujudkan keberdayaan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat. Karena selama ini berdasarkan fakta yang ada, masyarakat sekitar pesisir dihadapkan pada persoalan ketidakberdayaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan disekitarnya dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Banyak organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk mengatasi ketidakberdayaan yang dialami masyarakat pesisir dengan melakukan pendampingan dan membuat program-program untuk mengatasi masalah ketidakberdayaan tersebut.

Jaringan Perempuan Pesisir adalah sebuah LSM yang didirikan oleh kaum perempuan khususnya para ibu rumah tangga di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. LSM yang peduli terhadap kemiskinan dan lingkungan wilayah pesisir

ini mencoba memberikan perhatian kepada masyarakat pesisir untuk menuntut hak-hak dasar dengan penghidupan yang layak. Kerusakan lingkungan dan pencemaran perairan laut di wilayah pesisir merupakan imbas dari limbah domestik dan limbah industri, serta masalah penimbunan atau reklamasi pantai, inilah beberapa faktor dari terbentuknya suatu organisasi massa Jaringan Perempuan pesisir. Mereka yang tergabung dalam organisasi ini berperan aktif dalam penghidupan masyarakat pesisir kearah yang lebih baik.

Masalah kemiskinan dan masalah kerusakan lingkungan menjadi permasalahan yang paling diutamakan untuk segera di tindak lanjuti secara nyata melalui pemberdayaan masyarakat yang digerakkan oleh kaum ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir. Limbah domestik dan limbah industri yang tercemar di kawasan perairan pesisir Kota Bandar Lampung mendapatkan perhatian khusus untuk segera dibenahi oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir agar terciptanya ekosistem laut dan lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka menjadikan limbah dan sampah yang tercemar ini menjadi suatu potensi untuk di daur ulang dan dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Tidak hanya itu, LSM Jaringan Perempuan Pesisir juga membuat program pengelolaan pelestarian mangrove yang bertujuan untuk memperbaiki kembali kelestarian lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

Kondisi masyarakat yang rentan terhadap perubahan dan mudah mendapat pengaruh dari luar untuk melakukan pengrusakan karena minimnya ekonomi yang mereka miliki mengharuskan Jaringan Perempuan Pesisir sebagai LSM yang mengambil peranan juga untuk melakukan pendampingan di Pesisir Kota Bandar

Lampung dan segera mengantisipasinya dengan membuat beberapa strategi guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan serta pemahaman yang lebih terhadap arti penting kelestarian dan kesejahteraan demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang di awali dengan menganalisis masalah yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, dan kemudian mengidentifikasikan potensi yang ada di pesisir Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Jaringan Perempuan Pesisir yang terbentuk dari dorongan diri sendiri ibu-ibu pesisir yang mau ngerasain hidup yang lebih baik dan ngerasain lingkungan bersih yang mereka inginkan bukanlah cuma sekedar keinginan saja, buktinya LSM Jaringan Perempuan Pesisir ini bisa terbentuk dari tahun 2008. Kita disini mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan tapi dari keadaan yang ada, kita coba untuk berfikir bagaimana dan dengan cara apa kita bisa merasakan hidup yang lebih layak sehingga pada waktu itu kita tercetus untuk memanfaatkan sampah yang tercemar karena yang ada di seluruh kawasan pesisir ini di penuhi dengan sampah, inilah satu-satunya potensi yang nantinya bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan dengan cara mendaur ulangnya, dari sinilah kita mencoba menjadikan sampah yang tercemar ini menjadi suatu sumber daya yang bisa kita manfaatkan sehingga nantinya bisa menghasilkan uang. Dan kemudian dari rasa keinginan masyarakat yang mau terbebas dari lingkungan kotor membuat mereka merasa tergerak untuk menjadikan lingkungan mereka yang lestari dengan menanami bibit pohon karena manfaatnya untuk menjadikan lingkungan yang lestari tetapi juga bisa sebagai penghalang bencana alam." (Hasil wawancara 1 Juni 2012)

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat pesisir telah menentukan langkah dalam hal mengkaji permasalahan yang mereka alami demi menciptakan suatu perubahan yang berarti untuk kehidupan mereka sendiri di pesisir Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, Legirah selaku masyarakat pesisir Kelurahan Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"Kita orang ikut aktif di acara yang di adain sama LSM Jaringan Perempuan Pesisir, soalnya kita bisa ngehasilin uang dari ikut-ikut acaranya LSM Jaringan Perempuan Pesisir, itu uang dari kemampuan kita ngebuat kerajinan tangan yang udah di lajarin sama mereka, ya karna itu kami banyak yang tertarik dan ikut, banyak manfaatnya mas daripada ngejogrok di rumah." (Hasil wawancara 1 Juni 2012)

Selain itu Suheni selaku Ketua RT 003 Lingkungan I di Kelurahan Bumi Waras juga membenarkan pernyataan tersebut di atas, yang menyatakan bahwa :

"ia saya tentunya banyak tau apa kegiatan Jaringan Perempuan Pesisir disini. Karena saya disini bersama warga ikut serta membantu mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Masyarakat cukup antusias, ya walaupun tidak semua masyarakat sini ikut, tapi dinilai itu sudah cukup, mengingat kondisi sosial masyarakat disini yang masih sulit untuk menerima hal-hal baru. Berkaitan dengan kegiatan yang saya tau, Jaringan Perempuan Pesisir disni sudah berupaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan di sekitaran wilayah pesisir." (Hasil wawancara 1 Juni 2012)

Dari penjelasan di atas menggambarkan dalam pelaksanaan strategi Jaringan Perempuan Pesisir juga melibatkan oknum desa setempat. Strategi Jaringan Perempuan Pesisir akan membawa perubahan yang berarti bagi pembangunan di pesisir Kota Bandar Lampung. Perubahan itu terlihat dari antusiasnya masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan LSM Jaringan Perempuan Pesisir di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung khususnya Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung selatan. Sebagaimana konsep pemberdayaan, maka hal ini mengacu pada prinsip pemberdayaan menurut Sullivan, dkk (Dalam Suharto 2010:68—69) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai

partner, dan masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

Untuk itu, analisis SWOT adalah suatu analisis yang merupakan suatu instrumen ampuh apabila digunakan secara tepat karena berhubungan dengan peluang-peluang yang akan di hasilkan. Berikut adalah analisis SWOT terkait strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah:

a. Kekuatan (*Strengths*):

1. Terbentuknya LSM Jaringan Perempuan Pesisir.
2. Terdapat banyak timbunan sampah yang tercemar di kawasan pesisir sehingga dapat dijadikan suatu potensi untuk di daur ulang.
3. Pengolahan daur ulang sampah telah menciptakan peluang usaha bagi masyarakat pesisir.
4. Pengolahan daur ulang sampah merupakan suatu usaha alternatif bagi masyarakat pesisir.
5. Hasil dari pengolahan daur ulang sampah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
6. Dampak dari pengolahan daur ulang sampah dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan pesisir.
7. Adanya dukungan antusias dari aparat desa setempat dan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.

b. Kelemahan (*Weakness*):

1. Rendahnya kualitas sumber daya lokal khususnya SDM pesisir.

2. Proses pembuatan pupuk kompos kering dari olahan sampah memerlukan waktu sebulan dalam pembuatannya.
3. Kualitas pupuk kompos kering tidak dapat bertahan lama hingga jangka waktu bertahun-tahun.

c. Peluang (*Opportunities*):

1. Sampah organik dapat di jadikan olahan sampah berbentuk pupuk kompos kering dan pembersih kamar mandi.
2. Sampah anorganik dapat di jadikan olahan sampah berbentuk kerajinan tangan bunga plastik, pot bunga, dan tikar.
3. Adanya dukungan yang antusias dari oknum desa setempat dan golongan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
4. Semakin bertambahnya minat masyarakat untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan masalah kerusakan lingkungan.

d. Ancaman (*Threats*):

1. Pencemaran sampah di pesisir dapat menimbulkan berbagai macam wabah penyakit.
2. Semakin banyak pabrik-pabrik yang di bangun sehingga dampak buruknya akan menghasilkan limbah yang dapat mencemarkan ekosistem laut.

Diatas telah di sajikan analisis SWOT terkait strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah yang di lakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, kemudian untuk analisis SWOT terkait strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove meliputi:

a. Kekuatan (*Strengths*):

1. Penanaman bibit mangrove sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan pesisir.
2. Mangrove dapat menjaga stabilitas fungsi ekologi, mencegah tergerusnya pantai karena fungsinya sebagai peredam gelombang dan angin badai, penahan lumpur, dan juga sebagai usaha penghijauan.
3. Menjaga ekosistem laut sebagai produktifitas perairan binatang laut yang hidup di pantai.
4. Manfaat dari buah dan daun mangrove dapat dijadikan produk makanan dan minuman sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyaraakat setempat.
5. Adanya dukungan antusias dari aparat desa setempat dan golongan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
6. Semakin bertambahnya minat masyarakat untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan masalah kerusakan lingkungan.
7. Adanya bibit mangrove yang di sediakan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir berjumlah 1.500 bibit mangrove.
8. Adanya pelatihan-pelatihan serta motivasi yang diberikan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir mengenai pembibitan tanaman mangrove dan metode penanamannya sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

b. Kelemahan (*Weakness*):

1. Faktor alam yang tidak dapat diperkirakan atau diprediksikan akan mengalami suatu keadaan atau cuaca yang ekstrim pada habitat penanaman bibit mangrove.

c. Peluang (*Opportunities*):

1. Adanya dukungan antusias dari aparat desa setempat dan golongan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
2. Semakin bertambahnya minat masyarakat untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan masalah kerusakan lingkungan.
3. Dampak dari pengelolaan mangrove akan menciptakan kelestarian lingkungan di pesisir.
4. Manfaat dari buah dan daun mangrove dapat dijadikan produk makanan dan minuman sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyaraakat setempat.

d. Ancaman (*Threats*):

1. Terjangan ombak laut yang kuat sehingga dapat merusak bibit mangrove.
2. Gagalnya bibit mangrove untuk tumbuh akibat penananman bibit yang tidak sesuai dengan habitatnya.
3. Pengrusakan bibit mangrove oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis SWOT diatas untuk strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove, maka hal tersebut sesuai dengan konsep berfikir yang

disebutkan oleh Salusu (2008:350) bahwa menyusun alternatif-alternatif strategik dapat disusun dengan mengidentifikasi (1) kekuatan (*strength*), (2) kelemahan (*weakness)*, (3) peluang (*oppurtunit*y), (4) ancaman (*threat*) yang dimilki oleh suatu daerah. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa adanya berfikir strategis dalam konsep manajemen strategi merupakan suatu kekuatan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir secara berkelanjutan baik pada masa kini maupun di masa mendatang.

Terlebih bagi upaya peningkatan kemandirian masyarakat demi terciptanya kelestarian dan kesejahteraan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan dapat terus terjaga dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat, analisis SWOT sebagai rangkaian berfikir strategis merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu strategi kebijakan. Adapun strategi yang dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir yakni strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah, dan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove. Dengan adanya strategi tersebut diharapkan Jaringan Perempuan Pesisir dapat mencapai tujuannya.

Jaringan Perempuan Pesisir sebagai sebuah LSM yang peduli terhadap lingkungan wilayah pesisir yang mencoba memberikan perhatian kepada masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengolahan daur ulang sampah dan program pengelolaan pelestarian mangrove. Wilayah perairan pesisir Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Hal ini dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"strategi' strategi kita dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalanin sama ibu-ibu sini yang tergabung di LSM Jaringan Perempuan Pesisir untuk ngeberdayain pesisir Kota Bandar Lampung ini diwujudkan dengan program pengolahan daur ulang sampah. Program daur ulang sampah ini yang jadi program utama kita, karena kawasan pesisir ini terkenal karena kekumuhannya. Kita ngebuat program daur ulang sampah untuk mengurangi kerusakan lingkungan pesisir. Dari olahan sampah, kita bisa buat pupuk dan kerajinan tangan yang bervariasi kayak contohnya buat bunga plastik, tiker, dan masih banyak lagi kegiatan yang tentu saja dari hasil kerajinan ini kita dapet uang dari hasil penjualannya. Kemudian nggak cuma itu aja, kita juga punya program untuk kelestarian lingkungan hidup dengan nanam bibit mangrove. Langkahnya dengan ngadain pelatihan-pelatihan yang terkait dengan upaya penyadaran masyarakat untuk kelestarian kawasan pesisir, terus kita melakukan penetapan kawasan perlindungan, kemudian yang terakhir kita melakukan penanaman bibit mangrove. Pokonya banyak yang sudah kita lakukan disana bersama-sama dengan warga sini" (Hasil wawancara 1 Juni 2012)

Dari keterangan tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan strategi LSM Jaringan Perempuan Pesisir untuk memberdayakan masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung melalui pengolahan daur ulang sampah dan pengelolaan mangrove diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan. Dalam pengolahan daur ulang sampah, banyak kegiatan yang menghasilkan kerajinan tangan yang bervariasi seperti pupuk kompos dan berbagai kerajinan tangan yang di daur ulang dari sampah. Untuk pengelolaan mangrove, banyak kegiatan yang sudah dilakukan di Pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu mulai dari kegiatan pelatihan dalam upaya penyadaran masyarakat tentang kelestarian kawasan pesisir, penetapan kawasan perlindungan, kemudian penanaman bibit mangrove.

a. Strategi Peningkatan Ekonomi Melalui Pengolahan Daur Ulang Sampah

Strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah ini merupakan strategi yang dilakukan secara nyata oleh Jaringan Perempuan Pesisir demi tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan berkurangnya dampak dari pencemaran lingkungan yang terjadi di Pesisir Kota Bandar Lampung. Peningkatan ekonomi yang dilakukan disini merupakan suatu alternatif mata pencaharian yang diberikan kepada masyarakat dengan menjadikan limbah dan sampah yang tercemar di kawasan pesisir menjadi suatu potensi untuk di daur ulang dan dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk itu, bimbingan usaha bagi masyarakat menjadi sangat penting juga guna terwujudnya peningkatan kemampuan usaha masyarakat sehingga hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang dapat laku terjual dipasaran serta mampu bersaing dengan produksi-produksi usaha dari daerah lain.

Berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir ini sebelumnya telah diawali dengan kegiatan pelatihan, yaitu Pelatihan Kelompok Usaha Bersama. Pelatihan Kelompok Usaha Bersama ini merupakan upaya awal dalam peningkatan sumber daya manusia untuk pengelolaan usaha yang dilakukan serta membangun kesadaran dalam memanfaatkan limbah dan sampah yang tercemar sehingga menjadi suatu potensi untuk di daur ulang dan dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Manfaat dari pelatihan ini adalah terbangunnya kesadaran bersama dalam membangun usaha dan membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan pesisir Kota Bandar Lampung.

Pelatihan tersebut juga sebagai langkah awal pengorganisiran bagi kelompok-kelompok usaha dalam masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan Jaringan Perempuan Pesisir dalam melaksanakan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah ini dilakukan dengan memberikan masyarakat pembekalan berupa pelatihan keterampilan pemanfaatan sampah yang tercemar di kawasan perairan pesisir.

Hal ini dikemukakan oleh Faisal selaku Penasihat LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Pelatihan merupakan kegiatan yang kami lakukan sebelum melakukan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti saat kami berfikir untuk memanfaatkan sampah, kami melakukan pelatihan yang mendatangkan fasilitator dari LSM Up-Link (Urban Poor Linkage) untuk mengajarkan kami bagaimana membuat kompos. Pelatihan tersebut dijalankan secara kolektif oleh anggota Jaringan Perempuan Pesisir. Setelah kami bisa, kami praktekan dan kami ajarkan lagi pada balai-balai di kelurahan-kelurahan pesisir kota Bandar Lampung yang kami beri nama dengan Pelatihan Kelompok Usaha Bersama, sehingga bukan cuma anggota Jaringan Perempuan Pesisir saja yang bisa, tetapi masyarakat pesisirpun bisa dalam memanfaatkan pengetahuan tersebut." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Selanjutnya, Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Wilayah pesisir merupakan wilayah yang terdapat banyak sekali sampah organik dan anorganik, tetapi lebih banyak sampah anorganik berupa plastik, kertas dan kaleng. Kamipun melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang betapa besarnya masalah yang ditimbulkan oleh sampah dan sulitnya menaggulangi sampah, kami memberikan pemahaman bahwa sampah jangan dianggap musuh tetapi kawan yang dapat bermanfaat. Dari situ kamipun memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya dapat berekreasi dengan sampah. Sampah tersebut dapat diolah menjadi kerajinan tangan yang menarik. Syukur, sekarang semakin banyak masyarakat khusunya para ibu yang sadar akan hal tersebut dan mengisi waktunya untuk membuka usaha kerajinan tangan dari sampah." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Berdasarkan keterangan yang ada diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah diawali dengan memberikan pelatihan pemanfaatan sampah dan limbah untuk dijadikan berbagai kerajinan tangan yang dapat di jual untuk peningkatan ekonomi keluarga, meringankan beban ekonomi keluarga dan juga mengurangi akan dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah dan sampah di kawasan pesisir. Pelatihan tersebut juga sebagai langkah awal pengorganisiran bagi kelompok-kelompok usaha dalam masyarakat. Dengan adanya pengorganisiran kelompok usaha dalam masyarakat tersebut, diharapkan mampu untuk mengembangkan produksi kerajinan tangan dari hasil olahan sampah agar menjadi lebih optimal dan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung sehingga peningkatan ekonomi masyarakat dapat terwujud. Dengan adanya pelatihan yang telah diberikan, tentu saja dapat membantu masyarakat untuk mengenali dan memahami bahwa potensi yang dimiliki dapat mendatangkan keuntungan ekonomi apabila keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan baik dan terampil. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemberdayaan menurut Sullivan, dkk (Dalam Suharto 2010:68—69) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan, dan konsep pemberdayaan tersebut juga sesuai dengan dasar pemberdayaan menurut Dubois dan Miley (Dalam Wrihatnolo dan Nigroho 2007) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan sumber kesempatan.

Berikut adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakuakn oleh Jaringan Perempuan Pesisir:

1. Daur ulang sampah organik

Akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula sampah atau limbah yang dihasilkan. Sampah atau limbah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sering disebut limbah domestik atau sampah. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Selain itu aktifitas industri yang kian meningkat tidak terlepas dari isu lingkungan. Industri selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah, dan bila limbah industri ini dibuang langsung ke lingkungan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Inilah yang terjadi pada kawasan pesisir kota Bandar Lampung, dimana daerah ini telah mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya pencemaran sampah dan limbah yang disebabkan dari efek buruk pabrik-pabrik karena membuang limbah di perairan pesisir. Terdapat dua jenis sampah jika di segmentasikan, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh bakteri-bakteri pengurai atau disebut juga dengan sampah yang berasal dari benda hidup yang dapat didaur ulang seperti sampah rumah tangga, yaitu sampah makanan, sayuran, buah-buahan, daun, ranting, ampas kelapa, dan sejenisnya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurakan oleh bakteri pengurai seperti sampah plastik, kaleng, kertas, kaca, kain, dan sebagainya. Jaringan Perempuan Pesisir sebagai LSM yang peduli terhadap lingkungan telah berupaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan melakukan program

pemberdayaan daur ulang sampah, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pesisir karena selain untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, kegiatan ini juga merupakan suatu upaya dalam proses peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir.

Hal ini dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Program pemberdayaan melalui daur ulang sampah ini adalah program utama dari Jaringan Perempuan Pesisir. Seperti yang udah diliat selama ini kalau pesisir Kota Bandar Lampung ini adalah daerah yang dikenal miskin dan kumuh. Untuk itu kita punya kegiatan untuk ngolah sampah yang tercemar ini menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang dan di samping itu juga bisa ngurangin sampah yang tercemar. Kita punya dua rumah kompos, ada di Bumi Waras sama Kampung Baru, rumah kompos ini adalah tempat untuk ngolah sampah organik menjadi kompos, tentu saja kita melibatkan masyarakat supaya masyarakat bisa ada penghasilan sendiri dari kegiatan ini." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Selanjutnya, Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat pesisir sini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan daur ulang sampah ini karena proses cara ngebuat kompos ini terbilang mudah, dari sampah organik ini kita bisa mengolahnya menjadi kompos kering dan kompos cair. Kompos kering adalah kompos yang biasa dipake buat taneman, sedangkan kompos cair ini bukan berarti kompos yang cair untuk dipake buat taneman juga, tetapi kompos cair yang kita maksud disini adalah cairan pembersih kamar mandi. Cara membuat kompos kering yang pertama adalah kita pilah dulu sampahnya, mana sampah organik dan mana sampah anorganik, setelah kita pilah kemudian sampah organik yang berupa sayuran, buah-buahan, daun, ampas kelapa, dan sejenisnya ini kita tumpuk selama sebulan, tapi seminggu sekali kita balik dan aduk sampahnya sambil kita kepretin air dan kita siram air seember, tapi airnya di kepretin supaya jangan terlalu basah, kalau udah sebulan baru kita kasih karbon asam, setelah itu biarin aja sampai kering nanti juga hancur sendiri sampahnya, terusnya langsung digiling kira-kira sekitar lima belas menitan, abis digiling langsung kita ayak sehingga menjadi kompos kering yang halus, kompos yang masih kasar kita giling lagi sampe halus biar nggak nyisa, setelah itu baru kita kemas, kira-kira paling lama kita perlu waktu sebulan sepuluh hari untuk jadi sampe pengemasan. Satu kemasan itu kalau satu kilo nya kita jual harganya 1.500 rupiah. Itu untuk kompos kering, kalau untuk kompos cairnya

yaitu cairan pembersih kamar mandi cara buatnya juga gampang, pertama kita pilah dulu sampah oraganik dan anorganik, sampah organik yang dikumpulin disini untuk ngebuat pembersih kamar mandi harus sampah dari buah-buahan, setelah kita sudah ngumpulin sampah organiknya baru kita masukin sampah tadi ke dalem drum dan jangan terlalu penuh, setelah itu di campur zat asam, kita tutup selama dua puluh satu hari, kalau udah selesai itu baru kita saring airnya, airnya itu yg kita jual sebagai pembersih kamar mandi, satu botolnya dijual dengan harga lima ribu perbotol." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kegiatan daur ulang sampah untuk mengolah sampah organik kita jalanin bersama-sama dengan warga, kami ngejalanin kegiatan ini nggak formal, maksudnya nggak kami tentuin tanggal berapa harus ngolah tetapi kalau ada bahan yang udah kekumpul langsung kami kerjain. Kegiatan ini kami jalanin di rumah kompos, satu di rumah kompos Bumi Waras dan rumah kompos yang satunya ada di Kampung Baru, tapi untuk proses pembusukannya masyarakat disini bisa ngebusukin sampah dirumahnya masing-masing kemudian untuk ngolah dan pengayakannya barulah di lakukan di rumah kompos karena alatnya cuma ada di rumah kompos. Kegiatan olahan sampah organik ini bisa menghasilkan pupuk kompos kering dan pembersih kamar mandi. Untuk pupuk kompos kering kami jual satu kilonya dengan harga 1.500 rupiah, kalau untuk perbulannya kira-kira kami bisa ngejual sampe dua ratus lima puluh kiloan, kadang-kadang kalau ada pemborong malah sekali beli bisa ngambil sampe lima ratus kiloan. Terus untuk pembersih lantainya kami jual perbotol dengan harga lima ribu rupiah, satu botol ini isinya 600ml, untuk sebulan kira-kira kami bisa ngejual sampe sembilan puluh botol." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dilakukan dengan kegiatan daur ulang sampah organik, kegiatan ini dilakukan langsung oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat setempat. Dengan adanya Jaringan Perempuan Pesisir, masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sampah untuk dijadikan berbagai hasil dari pengolahan sampah melalui program daur ulang sampah, masyarakat pesisir sepakat untuk melakukan tindakan yang banyak

bermanfaat terhadap sampah-sampah tersebut karena melihat kondisi lingkungan pesisir yang sudah mengalami kerusakan lingkungan.

Kegiatan daur ulang sampah dilakukan dengan mendaur ulang sampah organik sehingga melalui kegiatan pemberdayaan akan menghasilkan dua jenis olahan sampah yaitu pupuk kompos kering dan pembersih kamar mandi. Proses daur ulang sampah yang dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir disini adalah pengolahan kembali bahan-bahan bekas atau sampah tertentu yang nilai ekonominya rendah atau bahkan tidak mempunyai nilai ekonomi tetapi bisa menjadi suatu potensi atau barang yang berharga dan berguna bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan adanya program daur ulang sampah organik yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat setempat, maka hasil dari kegiatan ini adalah ditandai dengan peningkatan ekonomi yang mereka rasakan karena olahan sampah tersebut dapat dijual dan sampah yang tercemar di daerah pesisirpun semakin berkurang dengan adanya kegiatan daur ulang sampah sehingga dapat mengantarkan masyarakat kepada kelestarian lingkungan pesisir. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat pesisir mengacu pada dasar-dasar pemberdayaan menurut Dubois dan Miley (Dalam Wrihatnolo dan Nugroho 2007) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.

Beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, yaitu gambar (2) menjelaskan masyarakat sedang melakukan proses pembusukan

sampah untuk kemudian akan di olah kembali menjadi pupuk kompos kering, gambar (3) adalah pupuk kompos kering, yaitu hasil dari kegiatan pemberdayaan melalui pendaur ulangan sampah organik, gambar (4) adalah sampah organik yang khususnya buah-buahan sebagai bahan dasar untuk pembuatan cairan pembersih kamar mandi, gambar (5) adalah cairan pembersih kamar mandi hasil dari olahan sampah organik. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan terkait pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dengan program daur ulang sampah organik:

Gambar 2. Proses daur ulang sampah

Gambar 3. Pupuk Kompos organik

Gambar 4. Sampah organik sebagai bahan dasar pembersih kamar mandi

Gambar 5. Pembersih kamar mandi

2. Daur ulang sampah anorganik

Sampah plastik atau yang disebut dengan sampah anorganik merupakan fenomena yang tidak dapat terhindarkan hampir disetiap penjuru lingkungan, sampah plastik selama ini juga benar-benar hanya dilihat sebagai sampah semata. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sepanjang pesisir kota Bandar Lampung hampir dipenuhi dengan sampah plastik atau anorganik, berbagai sampah plastik yang tercemar tersebut telah menjadi timbunan sampah yang lama-kelamaan merupakan ancaman bencana yang berbahaya, berbagai sampah plastik tersebut tidak dapat terurai sehingga tidak ramah lingkungan atau berbahaya bagi lingkungan. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurakan oleh bakteri pengurai seperti sampah plastik, kaleng, kertas, kaca, kain, dan sebagainya. Selain kegiatan daur ulang sampah organik, Jaringan Perempuan Pesisir juga mempunyai upaya dalam menanggapi pencemaran sampah plastik yang terjadi di kawasan pesisir dengan kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pengolahan daur ulang sampah anorganik. Sampah tersebut di olah para warga melalui suatu proses pendaur ulangan sampah sehingga menjadi barang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Hal ini dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Selain kegiatan daur ulang sampah organik, kegiatan daur ulang sampah anorganik juga menjadi suatu kegiatan utama yang Jaringan Perempuan Pesisir lakukan, kita ngejalanin kegiatan ini dengan tujuan supaya masyarakat jadi mampu secara mandiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya, dan juga supaya menjadikan kawasan pesisir ini mengurangi kerusakannya. Kita punya dua belas balai yang aktif dalam ngejalanin kegiatan ini yaitu di Balai Teratai, Balai Skip, Balai Sukun, Balai Keramat, Balai Krawang, Balai Rawa Baru, Balai Sukaraja, Balai Panjang Utara, Balai Panjang Selatan, Balai Panjang Semut, Balai Kampung Bugis, dan Balai Kampung Baru. Balai ini adalah perkumpulan kelompok ibu-ibu yang tersebar di beberapa kelurahan yang ngejalanin kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari sampah anorganik, tentu saja masyarakat terlibat cukup antusias supaya masyarakat bisa ada penghasilan sendiri dari kegiatan ini." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Selanjutnya, Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Kita punya dua belas balai yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan pengolahan sampah anorganik. Pengolahan sampah organik ini adalah pengolahan sampah-sampah yang berbahan dasar plastik yang nggak bisa lebur dan nggak bisa hancur sendiri, maka dari itu Jaringan Perempuan Pesisir mengubahnya menjadi berbagai kerajinan tangan. Dari olahan sampah anorganik ini kita bisa ngebuat kerajinan tangan seperti bunga plastik, pot bunga, dan tikar. Cara pembuatannya nggak terlalu susah, pertama kita pisah dan pilah mana sampah organik dan anorganik, setelah udah kita dapetin sampah anorganik ini barulah kita cuci terlebih dahulu supaya nggak kotor dan nggak bau, kita cuci bersih di air panas supaya kumannya juga pada ilang, setelah kita dapetin sampah plastiknya dan dicuci, barulah kita jemur sampe kering, setelah itu kita pilah lagi mana sampah sedotan, mana sampah plastik-plastik dan lain-lain terus kita bareng kelompok ibu-ibu ngerjainnya supaya jadi hasil kerajinan tangan yang bisa dijual dan hasilnya juga lumayan buat uang tambahan buat kita masyarakat pesisir." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Masyarakat cukup antusias dalam ngikutin kegiatan daur ulang sampah plastik, ada dua belas balai yang aktif dalam ngerjain kegiatan ini. Dari hasil kegiatan ini

kita bisa memproduksi hasil kerajinan tangan diantaranya ada bunga, pot bunga, dan tikar. Untuk bunga plastik kita jual satu tangkainya dari harga 1.500 rupiah sampai 3.000 rupiah, tergantung besar kecil dan bahannya apa. Terus kalau untuk kerajinan tangan pot bunga kita kasih harga mulai dari harga 10.000 rupiah untuk ukuran kecil, yang sedeng 30.000, dan yang paling gede bisa sampe 50.000 rupiah per potnya. Yang terakhir untuk tikar, harga tikar yang kecil dari harga 15.000 rupiah, yang ukuran sedang 30.000, dan yang paling lebar harga tikarnya 60.000 rupiah. Kita ngerjain kerajinan tangan ini bisa kapan aja, kalau ada bahan ya langsung kita kerjain, hasil dari penjualan kita ini lumayan buat nambah penghasilan keluarga." (Hasil wawancara 4 Juni 2012)

Berdasarkan keterangan yang ada diatas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi melalui kegiatan daur ulang sampah anorganik menjadi hasil kerajinan tangan bunga plastik, pot bunga, dan tikar dapat berjalan lancar bersama-sama dengan masyarakat pesisir. Dengan adanya kegiatan pendaur ulangan sampah anorganik ini, diharapkan masyarakat mampu untuk mengembangkan produksi barang kerajinan tangan yang mereka buat agar menjadi lebih optimal sehingga hasil dari penjualannya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat terwujud serta diiringi dengan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir.

Dengan adanya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang manfaat ekonomi yang dimiliki dari sampah, maka akan membawa masyarakat terkurangi dari kebodohan, kelaparan, dan kesakitan. Dalam hal ini, masyarakat yang bebas dari kebodohan adalah ketika masyarakat sudah mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dengan memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki sehingga tentu saja mereka dapat mengatasi masalah kelaparan dan kesakitan dari hasil peningkatan ekonomi yang telah mereka dapatkan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dapat mengantarkan masyarakat terbebas dari

kebodohan, kelaparan, dan kesakitan. Sehingga pemberdayaan sebagai tujuan sebagaimana yang diungkapkan Suharto (2010) yaitu pemberdayaan sebagai tujuan harus mampu meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan, dalam hal ini juga peran kaum ibu rumah tangga telah mengarah pada konsep peranan ibu rumah tangga menurut (Mappiare:1983) adalah konsep menurut perkembangan zaman, yaitu ibu rumah tangga mempunyai tugas sendiri dalam membangkitkan potensi-potensinya, mereka juga lebih suka menggunakan kemampuannya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan orang lain, atau wanita lainnya. Pada saat berada rumah, ibu rumah tangga mempunyai peranan yang sama rata dengan suami mereka karena selain sebagai ibu rumah tangga, tetapi kaum ibu juga mempunyai kegiatan diluar rumah yang memberdayakan mereka dengan kelompoknya.

Beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, yaitu gambar (6) menjelaskan kelompok ibu rumah tangga sedang melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pengolahan daur ulang sampah anorganik yang akan menghasilkan kerajinan tangan bunga plastik, gambar (7) adalah kerajinan tangan bunga plastik hasil dari olahan sampah anorganik, gambar (8) adalah hasil kerajinan tangan pot bunga, gambar (9) adalah kerajinan tangan pot bunga yang siap untuk di pasarkan, gambar (10) menjelaskan ibu rumah tangga sedang melakukan proses pembuatan kerajinan tangan tikar dari olahan sampah anorganik. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan terkait pelaksanaan strategi

peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dengan program daur ulang sampah anorganik:

Gambar 6. Psoses pembuatan kerajinan tangan bunga plastik

Gambar 7. Bunga plastik

Gambar 8. Hasil kerajinan tangan pot bunga

Gambar 9. Pot bunga dari olahan sampah anorganik

Gambar 10. Proses pembuatan kerajinan tangan manjadi tikar

b. Strategi Pelestarian Lingkungan Melalui Pengelolaan Mangrove

Adanya strategi pelestarian lingkungan oleh Jaringan Perempuan Pesisir bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan di pesisir Kota Bandar Lampung. Dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab yang dimiliki, diharapkan masyarakat mampu melestarikan lingkungan melalui pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Untuk itu, LSM Jaringan Perempuan Pesisir berinisiatif untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung, serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Jaringan Perempuan Pesisir. Kegiatan ini di adakan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2008.

Pelestarian kawasan pesisir melalui penanaman bibit mangrove bertujuan untuk menjaga stabilitas fungsi ekologi, untuk mencegah tergerusnya pantai karena fungsinya sebagai peredam gelombang dan angin badai, penahan lumpur, perangkap sedimen agar tidak longsor, menahan instrusi air laut, menurunkan gas CO2 di atmosfer, penahan angin dan tsunami, pelindung abrasi, sebagai program penghijauan, dan pencegah kerusakan lainnya sehingga terjaga ekosistem laut sebagai produktifitas perairan binatang laut yang hidup di pantai.

Strategi pelestarian lingkungan ini lahir karena adanya keharusan bagi masyarakat untuk melakukan perlindungan dan perbaikan untuk terciptanya kelestarian lingkungan pesisir. Dengan upaya meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka untuk melakukan pengelolaan mangrove secara benar, arif dan bijaksana agar tujuan pelestarian lingkungan dapat tercapai. Untuk itu, pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan program. Program ini meliputi kegiatan pelatihan dan motivasi dalam upaya penyadaran masyarakat tentang kelestarian kawasan pesisir, penetapan kawasan perlindungan, kemudian kegiatan yang terakhir adalah penanaman bibit mangrove.

1. Program pengembangan sumber daya manusia (PPSDM)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berlangsung pada bulan Januari 2008. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, kegiatan dituangkan dalam bentuk pelatihan kelestarian lingkungan dan motivasi kesadaran. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan memberikan materi-meteri dan pengetahuan mengenai kelestarian lingkungan hidup dengan media pelestarian pengelolaan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat pesisir akan kelestarian lingkungannya, selain itu pelatihan pengelolaan mangrove dilakukan sebagai satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pembibitan tanaman mangrove dan metode penanamnaya. Pada pelatihan ini masyarakat diajak untuk mengenali berbagai jenis vegetasi mangrove yang ada dan cara-cara melakukan pembibitan yang baik dan benar. Sedangkan untuk kegiatan motivasi dilakukan dalam proses upaya penyadaran masyarakat tentang arti penting kelestarian kawasan pesisir yang merupakan satu tahapan kegiatan untuk mendorong para masyarakat agar dapat bersentuhan langsung dengan alam. Dalam kegiatan motivasi, masyarakat juga diajak turun langsung untuk berobservasi yang dilakukan dialam terbuka, kegiatan ini menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang dapat mendorong adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya, dan dari kegiatan motivasi ini juga masyarakat disadarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi tetapi lebih diarahkan untuk membuang sampah di rumah kompos atau yang biasa mereka sebut sebagai bank sampah. Tidak hanya itu, kegiatan motivasi juga memberikan manfaat lain yang menjadikan suatu tahapan untuk mendorong lahirnya para masyarakat yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mandiri atau berani dalam menyampaikan setiap pendapat. Melalui kegiatan motivasi ini diharapkan akan muncul pula para masyarakat yang akan menjadi motivator terhadap kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan menjadi pelopor kelestarian lingkungan.

Hal ini dikemukakan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Selain strategi pengolahan daur ulang sampah, kita juga punya strategi pelestarian mangrove. Kondisi hutan bakau di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sangat memprihatinkan, ratusan hektar hutan bakau sekarang udah beralih fungsi jadi sentra pembangunan dan rumah-rumah penduduk, kurang lebih cuma dua hektar lagi hutan bakau yang nyisa. Untuk itu, kita Jaringan Perempuan Pesisir berupaya ngelestariin kembali lingkungan dengan ngebuat Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari program ini kita punya kegiatan pertama yaitu ngadain pelatihan, di kegiatan ini Jaringan Perempuan Pesisir ngasih materi tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup dengan cara pelestarian bakau yang tujuannya untuk meningkatin pemahaman masyarakat pesisir akan kelestarian lingkungannya, terus pelatihan pengelolaan mangrove ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk ningkatin pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pembibitan tanaman mangrove dan metode penanamannya. Pada pelatihan ini masyarakat diajak untuk mengenali berbagai jenis vegetasi mangrove dan cara-cara nanem bibit mangrovenya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, Jaringan Perempuan Pesisir juga ngasih motivasi dan observasi langsung untuk nyadarin masyarakat tentang arti penting kelestarian kawasan pesisir yang ini juga adalah tahapan kegiatan untuk ngedorong para masyarakat supaya bersentuhan langsung dengan alam, dan masyarakat sini dilajarin untuk nggak buang sampah di laut lagi tapi diarahin untuk buang sampah di rumah kompos." (Hasil wawancara 7 Juni 2012)

Selanjutnya, Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Jadi, dalam hal pembinaan dan pendampingan masyarakat memang dibutuhin perhatian dari Jaringan Perempuan Pesisir sendiri, seperti pemberian pelatihan dan motivasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Untuk upaya pelestarian lingkungan pesisir, kita berdayakan masyarakat sebagai pengelola langsung dengan memfasilitasi mereka melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nggak hanya masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini, tapi kita juga disini kita ajak anak-anak untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan dengan tujuan agar sejak dini mereka sadar dan paham betapa pentingnya kelestarian lingkungan bagi keberlangsungan hidup mereka." (Hasil wawancara 8 Juni 2012)

Hal tersebut dibenarkan oleh Hi. Chairul Saleh selaku Kepala Lingkungan I Kelurahan Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"Ya Jaringan Perempuan Pesisir di sini cukup membantu. Mereka membantu kita dalam upaya melestarikan lingkungan dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat pesisir. Dengan tujuan agar manfaat kelestarian mangrove di desa ini dapat dinikmati masyarakat, tanpa Jaringan Perempuan Pesisir kita belum ada orang paham. Kemudian juga dari pelatihan mangrove, masyarakat dapat

penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan mangrove. Sekarang disini kita ada kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lewat ini masyarakat bisa banyak belajar dan mulai sadar kalau mangrove itu bisa ngelestariin lingkungan dan mangrove juga bisa mencegah banjir, kemudian desa aman dari terjangan angin laut langsung." (Hasil wawancara 7 Juni 2012)

Kegiatan yang dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir guna mendukung pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan diawali dengan menjalankan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai pelatihan dan motivasi kepada masyarakat di pesisir Kota Bandar Lampung. Untuk menunjang kegiatan tersebut Jaringan Perempuan Pesisir melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberikan materi pendidikan tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan mangrove bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitarnya di masa yang akan datang. Pelatihan dan motivasi yang diberikan sangat penting dan perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan, pemahaman serta keterampilan kepada masyarakat agar dengan ilmu dan pemahaman yang dimiliki akan mampu melakukan pengelolaan mangrove secara berkesinambungan, serta upaya penyadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan demi berkurangnya dampak pencemaran lingkungan. Untuk itu, upaya pelatihan dan motivasi dalam bentuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini penting dilakukan karena merupakan tahap awal dari sebuah proses pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan ini juga hendaknya merupakan proses yang terus-menerus dilaksanakan pada setiap tahapan proses pengelolaan dan pemberdayaan. Dalam konsep ini, pemberdayaan mengacu pada prinsip pemberdayaan menurut Sillivan, dkk (Dalam Suharto 2010:68) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

Beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, yaitu gambar (11) menjelaskan masyarakat sedang mengikuti kegiatan pelatihan tentang pelestarian lingkungan serta pelatihan tentang penanaman mangrove yang baik dan benar, gambar (12) menjelaskan masyarakat sedang mengikuti kegiatan motivasi untuk kesadaran masyarakat pesisir terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan terkait pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove:

Gambar 11. kegiatan pelatihan pelestarian lingkungan yang diadakan pada bulan Januari 2008

Gambar 12. Kegiatan motivasi kesadaran masyarakat yang diadakan pada bulan Januari 2008

2. Penetapan kawasan perlindungan

Kegiatan penetapan kawasan perlindungan diawali dengan pembuatan daerah perlindungan mangrove, kegiatan ini telah dilakukan pada bulan Februari tahun 2008. Untuk melakukan pembuatan daerah perlindungan mangrove hal pertama yang dilakukan adalah penetapan lokasi. Penetapan lokasi dilakukan dengan survey lapangan dan inventarisasi data. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal untuk menjalankan daerah perlindungan mangrove dimana lokasi yang dipilih akan dijadikan kawasan penanaman dengan membangun kesepakatan-kesepakatan di tingkat masyarakat nantinya. Penetapan lokasi yang dilakukan pada kegiatan ini berupa masukan yang sebagian besar didapat dari suara masyarakat pesisir. Dalam kegiatan ini masyarakat memainkan peranan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dan disini LSM Jaringan Perempuan Pesisir bertugas sebagai fasilitator pelaksana program serta pendampingan kegiatan.

Hal ini dikemukakan oleh Faisal selaku Penasehat Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Jaringan Perempuan Pesisir sudah memainkan perannya dalam upaya melestarikan kawasan lingkungan pesisir, tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan saja yang mereka berikan tetapi terus dimaksimalkan dengan upaya yang nyata. Untuk itu Jaringan Perempuan Pesisir bersama-sama masyarakat melanjutkan program pelatihan dengan program penetapan kawasan perlindungan, ini salah satu wujud nyata dari program tersebut karena masyarakat terjun langsung dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaannya." (Hasil wawancara 14 Juni 2012)

Selanjutnya, Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"penetapan kawasan perlindungan dilakukan dengan menunjuk suatu daerah untuk menjadi kawasan penanaman dan perlindungan mangrove. Dan untuk menerapkan itu semua kita menerapkan pengelolaan kawasan berbasis masyarakat. Jadi upaya penetapan daearah perlindungan yang untuk di tanami mangrove dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung." (Hasil wawancara 14 Juni 2012)

Selanjutnya, Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"kemudian ada kita melakukan kegiatan penetapan kawasan perlindungan untuk kelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan itu kita mulai disana dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menentukan daerah perlindungan mangrove. Mulai dari pembuatan daerah perlindungan mangrove, penetapan lokasi sampai dengan tahap inventarisasi data. Ya menurut saya mereka disni sudah cukup antusias mau terlibat dalam kegiatan kita." (Hasil wawancara 16 Juni 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Hi. Chairul Saleh selaku Kepala Lingkungan I Kelurahan Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"kegiatan Jaringan Perempuan Pesisir disini banyak mas, dulu saya sendiri sering diajak Jaringan Perempuan Pesisir untuk ikut rapat terkait pengelolaan kawasan mangrove ini. Disitu kita merancang daerah yang perlu dilakukan penanaman, kemudian kita ke lokasi untuk mencari data. Kegiatan tersebut efektif menurut saya untuk upaya melestarikan kawasan pesisir ini." (Hasil wawancara 16 Juni 2012)

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan ini masyarakat memainkan peranan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan. Masyarakat diberi kesempatan untuk berfikir dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan melalui pelatihan dan motivasi yang sudah diberikan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir. Dalam kegiatan tersebut LSM Jaringan Perempuan Pesisir bertugas sebagai fasilitator pelaksana program sekaligus pendamping kegiatan. Koordinasi yang baik antara Jaringan Perempuan Pesisir dengan masyarakat yang dipercaya untuk melakukan pelaksanaan kegiatan yang cukup efektif.

Dan dari adanya kegiatan tersebut telah diperoleh hasil yaitu terbentuknya daerah penetapan kawasan perlindungan yang nantinya akan di tanami bibit mangrove pada tanggal 8 Maret 2008 yang bertepatan pada Hari Perempuan Internasional. Dalam hal ini pemberdayaan mengacu pada prinsip pemberdayaan menurut Sullivan, dkk (Dalam Suharto 2010:68) yang menyatakan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

Beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, yaitu gambar (13) menjelaskan bahwa aparat desa dan masyarakat pesisir setempat telah berperan langsung dalam penetapan kawasan perlindungan yang di adakan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, gambar (14) menjelaskan penetapan kawasan perlindungan telah di tetapkan dari hasil keputusan berama dengan aparat desa dan masyarakat pesisir setempat yang kemudian akan di tanami bibit mangrove di kelurahan Bumi Waras hingga Kelurahan Sukaraja pada

tanggal 8 Maret 2008 yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan terkait pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove:

Gambar 13. Peran langsung masyarakat dalam penetapan kawasan perlindungan

Gambar 14. Penetapan keputusan daerah kawasan perlindungan

3. Penanaman bibit mangrove

Kegiatan penanaman bibit mangrove ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 2008 yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Kegiatan ini dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat pesisir setempat. Lokasi yang telah ditetapkan terletak di pesisir Teluk Betung Selatan khususnya Kelurahan Bumi Waras hingga Sukaraja. Pembibitan yang dilakukan berupa pembibitan bakau besar dan bakau kecil. Kegiatan pembibitan ini dilakukan pada areal pasang surut yang merupakan habitat tanaman mangrove. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan tahapan pembersihan lahan, persiapan media tanah, pengisian polibag, pembuatan batang bambu sebagai hardcase bibit mangrove, pembuatan bedengan, pengisisan bibit ke hardcase, hingga penanaman bibit mangrove. Semua tahapan pembibitan ini dilakukan oleh masyarakat pesisir dan LSM Jaringan Perempuan Pesisir.

Hal ini dikemukakan oleh Faisal selaku Penasehat LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kegiatan pembibitan mangrove dilakukan oleh masyarakat yang termasuk dalam pengelola pembibitan. Lokasi yang digunakan terletak di Bumi Waras sampai Sukaraja. Pembibitan yang dilakukan berupa pembibitan bakau besar dan bakau kecil. Kegiatan pembibitan tersebut dilakukan pada areal pasang surut yang merupakan habitat tanaman mangrove. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan tahapan pemebersihan lahan, persiapan media tanah, pengisian polibag, pembutan batang bambu, pembuatan bedengan, pengisisan polibag, kemudian yang terakhir penanaman bibit mangrove. Semua tahapan pembibitan dilakukan oleh masyarakat dan Jaringan Perempuan Pesisir. Sedangkan kegiatan perlindungan kawasan mangrove diawali dengan identifikasi tempat penanaman.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi yang akan digunakan sebagai areal pembibitan dan areal penanaman. Setelah dilakukan identifikasi dan penetapan lokasi areal pembibitan kemudian kita melakukan penanaman bibit mangrove. Disitulah kita coba untuk menerapkan penanaman mangrove yang baik dan benar sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang udah dijalankan. Pelatihan pengelolaan hutan mangrove dilakukan sebagai satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pembibitan tanaman mangrove dan metode penanamnaya. Pada pelatihan itu masyarakat diajak untuk mengenali berbagai jenis vegetasi hutan mangrove yang ada dan bagaimana cara-cara melakukan pembibitanya. Kita sudah berhasil hingga proses penanamannya, tetapi seiring berjalannya waktu bibit mangrove yang kami tanami satu persatu mulai rusak karena terjangan ombak laut, hingga saat ini hanya beberapa batang pohon saja yang hidup." (Hasil wawancara 18 Juni 2012)

Selanjutnya, Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Program penanaman bibit mangrove itu adalah salah satu program nyata kita waktu itu untuk ngelestariin lingkungan pesisir. Kita udah nyiapin masyarakat dengan pelatihan-pelatihan dan motivasi, terus kita ajak turun langsung masyarakat sini keaktifannya dalam nentuin perencanaan sampai penerapannya, terus kita juga secara langsung bersama-sama untuk nanem bibit mangrovenya. Untuk persiapan penaneman bibit mangrove ini kita banyak dibantu masyarakat sini khusunya bapak-bapak, kayak pas motong-motongin batang bambu itu buat narok bibit mangrovenya. Kita udah nyiapin seribu lima ratus bibit mangrove buat di tanem di Sukaraja, tapi kita gagal di program penanemam mangrove ini karena bibit yang kita tanemin pada rusak karna ombak." (Hasil wawancara 19 Juni 2012)

Selanjutnya, Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Kita udah cukup puas dengan usaha kami untuk ngelestariin lingkungan pesisir ini dengan upaya nanem mangrove, kita udah berhasil ngejalanin pelatihan-pelatihan, udah berhasil dalam nentuin kawasan perlindungan yang kita tetapin bersama masyarakat setempat, dan kita juga udah berhasil nanem seribu lima ratus mangrove bersama-sama dengan masyarakat. Tetapi semua itu gagal dan tujuan kita untuk ngelestariin lingkungan nggak tercapai karena bibit yang kita tanemin itu di terjang ombak laut, padahal udah kita lapisin batang bambu supaya bibit itu kokoh, tapi ya tetep nggak sesuai harepan kita. Kita udah berusaha untuk benerin bibit-bibit yang di sapu ombak itu, tetapi semakin hari makin keliatan klo ombak memang terus menerus nerjang bibit kami, trus untuk ngelanjutin kegiatan ini kita nggak bisa nanem lagi karna kita nggak punya dana untuk nyoba lagi nanem bibit

mangrove itu, dalam kurun waktu tahun 2008 itu juga kegiatan ini berhenti." (Hasil wawancara 19 Juni 2012)

Selanjutnya, Mardiyah selaku Anggota LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Masyarakat cukup antusias dengan kegiatan penanaman bibit mangrove, keliatan dari masyarakat yang terjun langsung buat nanemnya, bukan cuma ibu-ibu aja tapi anak-anak dan bapak-bapak juga ikut kegiatan itu buat nanem mangrovenya ya walaupun nggak berhasil sampe sekarang." (Hasil wawancara 19 Juni 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Rena selaku Masyarakat yang menyatakan bahwa :

"Dulu, pas itu kami masyarakat pesisir sini ikut juga di acara penaneman bibit bakau, kita ikut kegiatan ini karna kesadaran sendiri mas nggak ada sedikitpun paksaan dari Jaringan Perempuan Pesisir. Yang punya daerah ini kan kitaorang, jadi ya siapa lagi yang mau ngelolanya kalau bukan kita, kita malah berterima kasih kepada Jaringan Perempuan Pesisir yang udah peduli dengan lingkungan pesisir ini, tapi bibit mangrovenya pada nggak tumbuh karena ombak, ya seenggaknya ada lah usaha kami pas itu buat lingkungan kami." (Hasil wawancara 19 Juni 2012)

Berdasarakan keterangan diatas dapat dikatakan kegiatan pembibitan mangrove berjalan secara terarah sesuai dengan harapan. Jaringan Perempuan Pesisir melibatkan masyarakat secara langsung pada tanggal 8 Maret 2008 untuk melakukan pembibitan mangrove dengan jumlah seribu lima ratus bibit yang telah difasilitasi oleh Jaringan Perempuan Pesisir, hal ini berarti Jaringan Perempuan Pesisir sudah melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan mengacu pada prinsip pemberdayaan menurut Sullivan, dkk (Dalam Suharto, 2010:68) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan, kemudian dalam hal ini

masyarakat juga harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

Dari berbagai fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara tersebut menggambarkan strategi pelestarian lingkungan memalui penanaman bibit mangrove dilakukan dengan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari program pelatihan, penentuan kawasan daerah perlindungan mangrove, hingga penanaman bibit mangrove. Untuk sampai pada tahap penanaman bibit mangrove sudah di katakan cukup berhasil karena berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, tetapi seiring berjalannya waktu bibit mangrove yang ditanamai oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat pesisir setempat tidak berhasil atau tidak tumbuh untuk menjadi pohon mangrove dikarenakan terjangan ombak laut, masyarakat sudah bertindak untuk memperbaiki kembali mangrove yang rusak, tetapi semakin berjalannya waktu semakin banyak bibit mangrove yang rusak akibat terjangan ombak laut, untuk melanjutkan kegiatan ini mereka tidak punya dana lagi untuk menjalankan kegiatan penanaman bibit mangrove. Strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove ini berakhir dalam kurun waktu satu tahun yang masih dalam tahun 2008.

Berkaitan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir melalui strategi pelestarian lingkungan diawali dengan upaya pelestarian mangrove. Masyarakat diarahkan pada bagaimana mengelola dan memanfaatkan mangrove secara baik dan benar agar nantinya tercipta kelestarian lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung walaupun pada kenyataannya program

pelestarian lingkungan melalui penanaman bibit mangrove ini belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil.

Beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, yaitu gambar (15) menjelaskan bahwa masyarakat sedang memberikan bantuan dan peran aktifnya dalam persiapan program penanaman bibit mangrove yang di adakan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, gambar (16) menjelaskan bahwa LSM Jaringan Perempuan Pesisir beserta masyarakat pesisir setempat sedang melakukan penanaman bibit mangrove yang di tanami di Kelurahan Bumi Waras hingga Kelurahan Sukaraja, gambar (17) menjelaskan peran aktif masyarakat pesisir setempat sedang melakukan penanaman bibit mangrove. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan terkait pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove:

Gambar 15. Bantuan masyarakat dalam persiapan penanaman bibit Mangrove

Gambar 16. Penanaman bibit mangrove

Gambar 17. Penanaman bibit mangrove bersama masyarakat setempat

2. Hasil yang telah tercapai dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir

Untuk mengetahui hasil yang telah tercapai setelah adanya pelaksanaan strategi LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan menurut Suharto (2010:58) yang menyatakan bahwa sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa pernyataan mengenai pemberdayaan sebagai tujuan tersebut peneliti gunakan sebagai tolak ukur pencapaian hasil dari adanya strategi yang dijalankan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir.

A. Strategi Peningkatan Ekonomi Melalui Pengolahan Daur Ulang Sampah

Strategi pengolahan daur ulang sampah merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir dengan berorientasi pada peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan sampah dan juga berorientasi pada berkurangnya dampak pencemaran lingkungan dan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Untuk itu masyarakat perlu memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup agar peningkatan ekonomi dapat terwujud dan berdampak pula terhadap kelestarian kawasan pesisir. Membangun kekuatan masyarakat untuk melakukan usaha dengan baik dan bekerja keras merupakan satu langkah awal untuk mendorong adanya peningkatan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah ini, peneliti mengamati keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan dengan melihat seberapa besar strategi yang ada ini mampu mencapai tujuan sebagaimana yang telah dikemukakan Suharto (2010) bahwa pemberdayaan sebagai tujuan harus mampu meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dan kemampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. **Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.**

Agar masyarakat memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Berkaitan dengan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir telah mengarah pada upaya membebaskan masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung dari kebodohan, kelaparan, dan kesakitan.

Masyarakat yang bebas dari kebodohan adalah masyarakat yang sudah memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang ada dan mengganggu kehidupannya. Sedangkan masyarakat yang bebas dari kelaparan adalah masyarakat yang sudah memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilki untuk mempertahankan kehidupannya. Kemudian masyarakat yang bebas dari rasa kesakitan adalah masyarakat yang jauh dari kemiskinan dalam artian masyarakat sudah memilki kemampuan dan kekuatan untuk mempertahankan hidupnya jauh dari kelaparan dan tepenuhinya kebutuhan hidup sehat mereka.

Berkaitan dengan hal ini, telah dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kami telah mengupayakan agar kegiatan pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat pesisir. Sebelum melakukan program-program pemberdayaan, kami telah bekerjasama dengan melakukan pelatihan yang mendatangkan fasilitator dari LSM Up-Link (Urban Poor Linkage) untuk mengajarkan kami bagaimana membuat kompos. Setelah itu barulah kami berikan pelatihan lagi kepada seluruh anggota dan masyarakat pesisir supaya masyarakat ngerti cara pembuatan kompos dari olahan sampah. Dari sinilah masyarakat ngerti dan bisa cara membuat

kompos sehingga dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi mereka" (Hasil wawancara 27 Juni 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Masyarakat jadi paham dan mengerti cara ngolah sampah setelah adanya pelatihan dari Jaringan Perempuan Pesisir. Untuk saat ini penghasilan dari kerajinan tangan yang udah mereka produksi udah cukup buat uang tambahan bagi keluarganya." (Hasil wawancara 27 Juni 2012)

Berdasarkan pendapat yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir telah terkurangi dari kebodohan yaitu dapat dilihat dari masyarakat yang sudah mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dengan memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki sehingga tentu saja mereka dapat mengatasi masalah kelaparan dan kesakitan dari hasil peningkatan ekonomi yang telah mereka dapatkan. Dengan demikian maka dapat dikatakan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dapat mengantarkan masyarakat terbebas dari kebodohan, kelaparan, dan kesakitan. Sehingga pemberdayaan sebagai tujuan sebagaimana yang diungkapkan Suharto (2010) yaitu pemberdayaan sebagai tujuan telah mampu meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan.

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Kemampuan masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan merupakan salah satu bagian dari tujuan pemberdayaan menurut Suharto (2010). Sumber produktif yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan memanfaatkan limbah dan sampah yang tercemar ini menjadi suatu potensi untuk di daur ulang dan dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berkenaan dengan sumber produktif ini adalah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah dipaparkan dalam strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dengan kegiatan kerajinan tangan yaitu sampah organik di olah menjadi pupuk kompos kering dan pembersih kamar mandi, kemudian untuk sampah anorganik di olah menjadi kerajinan tangan bunga, pot bunga, dan tikar.

Sumber produktif ini dijelaskan oleh Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

> "produksi kerajinan tangan dari hasil pengolahan daur ulang sampah yang dikerjain sama ibu-ibu sini memang lagi kita optimalin, disana kita jadiin kegiatan yang utama karena ngehasilin duit. Kerajinan tangan yang dibuat oleh kami emang layak buat di jual, karena kita juga nggak basing-basing buatnya, kita buat secantik mungkin supaya laku di jual dan nggak ngecewain yang beli." (Hasil wawancara 29 Juni 2012)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menciptakan alternatif pendapatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah dengan kegiatan memproduksi berbagai kerajinan tangan yaitu sampah organik di olah menjadi pupuk kompos kering dan pembersih kamar mandi,

kemudian untuk sampah anorganik di olah menjadi kerajinan tangan bunga, pot bunga, dan tikar. Dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat pesisir dan anggota dari Jaringan Perempuan Pesisir itu sendiri melalui pengolahan daur ulang sampah. Untuk itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha produksi kerajinan tangan dari olahan sampah agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan, Untuk menunjang kegiatan usaha produksi berbagai kerajinan tangan tersebut, Jaringan Perempuan Pesisir berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa *stakeholder* seperti Biro Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, pihak Kelurahan dan beberapa Koran Berita untuk membantu melakukan promosi produk hasil usaha masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung.

Hal tersebut diungkapkan oleh Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"dalam strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah, Biro Pemberdayaan Perempuan, pihak Kecamatan Teluk Betung Selatan ngebantu dalam penjualannya, jadi barang-barang kerajinan tangan kami dibantu pemasarannya, pihak kelurahan juga ngebantu. Bukan Cuma itu aja, tapi kami juga di bantu dari pihak koran berita." (Hasil wawancara 29 Juni 2012)

Selanjutnya, Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"kita pernah dibantu dari Biro Pemberdayaan Perempuan, pihak kecamatan, kelurahan, dan koran, kita pernah di bantu pihak koran untuk pemasaran berupa bazar." (Hasil wawancara 29 Juni 2012)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah di pesisir Kota Bandar Lampung diwujudkan dengan menciptakan alternatif usaha pengolahan daur ulang sampah

dengan hasil berbagai kerajinan tangan yang telah diciptakan oleh Jaringan Perempuan Pesisir. Ada keterlibatan beberapa *stakeholder* yaitu Biro Pemberdayaan Perempuan, pihak Kecamatan Teluk Betung Selatan, pihak Kelurahan dan beberapa beberapa Koran Berita Harian yang secara langsung mendukung kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan observasi peneliti terhadap kegiatan upaya peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah yang di lakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat setempat telah berjalan dengan sesuai harapan, yaitu terciptanya masyarakat yang terampil dalam melakukan pemanfaatan sampah yang tercemar di kawasan pesisir sebagai usaha alternatif peningkatan pendapatan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat pesisir kota Bandar Lampung sudah melakukan kegiatan daur ulang sampah organik yaitu memproduksi pupuk kompos dan pembersih kamar mandi, kemudian daur ulang sampah anorganik yang telah menghasilkan kerajinan tangan yang berupa bunga plastik, pot bunga, dan tikar. Dari olahan sampah organik yang di proses hingga menjadi pupuk kompos kering mampu di jual perkilonya dengan harga Rp. 1.500/kg dan untuk kurun waktu dalam sebulan mampu menjual pupuk kompos hingga 250kg/bulan, sedangkan untuk pembersih kamar mandi di jual perbotolnya dengan harga Rp. 5.000/botol(600ml) dan dalam kurun waktu sebulan mampu menjual hingga 90 botol pembersih kamar mandi. Kemudian untuk olahan daur ulang sampah anorganik yang telah menghasilkan kerajinan tangan bunga plastik dijual pertangkainya dengan harga Rp. 1.500/tangkai sampai dengan Rp. 3.000/tangkai sesuai dengan besar-kecilnya ukuran bunga dan bahan dasar pembuatannya,

selanjutnya untuk hasil kerajinan tangan pot bunga di jual perbarangnya mulai dari Rp. 10.000/pot untuk ukuran kecil, untuk ukuran sedang dengan harga Rp. 30.000/pot, dan yang ukuran paling besar di jual dengan harga Rp. 50.000/potnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil kerajinan tangan tikar, dari ukuran yang kecil dijual dengan harga Rp. 15.000/tikar, untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp. 30.000/tikar, dan yang paling lebar dijual dengan harga Rp. 60.000/tikar.

Berdasarkan keterangan dan data yang ada maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya program daur ulang sampah sebagai sumber produktif atau alternatif pendapatan sudah mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir kota Bandar Lampung, namun peningkatan ekonomi tersebut yang didapat belum mampu membawa masyarakat memenuhi kebutuhan hidup standar yang telah di tetapkan Provinsi Lampung dalam upah minimum regional (UMR). Dengan demikian diperlukan sikap inovatif dan keseriusan dari Jaringan Perempuan Pesisir serta masyarakat pesisir kota Bandar Lampung agar alternatif usaha sebagai peningkatan pendapatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah ini dapat berjalan secara optimal dan benar-benar mampu membawa masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Membawa masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan sebagai tujuan sebagaimana yang telah diungkapkan Suharto

(2010). Jaringan Perempuan Pesisir sebagai LSM yang melakukan program pemberdayaan sekaligus pendampingan masyarakat di pesisir Kota Bandar Lampung dalam hal ini berupaya memberikan bimbingan usaha bagi masyarakat. Bimbingan usaha menjadi sangat penting guna terwujudnya peningkatan kemampuan usaha masyarakat agar hasil kerajinan tangan yang telah mereka buat dapat laku dipasaran dan mampu bersaing dengan produksi-produksi kerajinan tangan dari daerah lain, sehingga persaingan harga dapat terjamin disamping adanya upaya-upaya penciptaan usaha alternatif.

Pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah di pesisir Kota Bandar Lampung ini diawali oleh Pelatihan Kelompok Usaha Bersama. Pelatihan Kelompok Usaha Bersama merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia dengan pengelolaan usaha yang dilakukan, produk yang dihasilkan, serta kesadaran dalam melakukan perlindungan pelestarian kawasan pesisir.

Berkaitan dengan hal tersebut diungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

> "Kita punya kegiatan yang kita kasih nama Pelatihan Kelompok Usaha Bersama, kegiatan ini merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia dengan pengelolaan usaha yang dijalanin, produk yang mau dihasilin, dan juga upaya penyadaran masyarakat dalam melakukan perlindungan pelestarian kawasan pesisir. Masyarakat pesisir tertarik dengan kegiatan ini dan banyak yang ikut, karena mereka tau kalo pelatihan itu bisa ngasih manfaat yang berguna buat diri mereka sendiri. Mereka keliat cukup antusias di kegiatan ini." (Hasil wawancara 30 Juni 2012)

Namun tidak semua yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir sepenuhnya berjalan dengan lancar, setelah diadakannya berbagai kegiatan dalam bentuk pelatihan, masyarakat pesisir yang melaksanakan program pemberdayaan tersebut

dihadapkan dengan kendala, yaitu sulitnya melakukan pemasaran dari hasil kerajinan tangan mereka. Namun mereka tidak berhenti dalam mengembangkan kemampuannya, Jaringan Perempuan Pesisir tetap mengupayakan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak Kecamatan Teluk Betung Selatan, pihak Kelurahan, dan beberapa Koran Harian untuk membantu melakukan promosi dan memfasilitasi dalam promosi.

Berkaitan dengan hal tersebut diungkapkan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"produksi hasil-hasil dari kegiatan pemberdayaan berupa kerajinan tangan memang sudah kami produksi, namun dalam proses pemasarannya kami masih berupaya dengan melakukan promosi melalui pameran-pameran dan bazar yang di adain, biasanya bazar itu sering diadakan di kampus-kampus oleh mahasiswa, mereka ngambil barang kerajinan tangan dari kita dan mereka juga yang menjual di bazar tersebut, dengan cara ini maka tentu saja membantu kami dalam pemasaran sehingga pendapatan perekonomian kami meningkat." (Hasil wawancara 30 Juni 2012)

Selanjutnya, Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Kita tetap memproduksi berbagai kerajinan tangan, tetapi cuma dalam skala kecil dengan cara memproduksi seadanya sesuai kebutuhan dan permintaan. Mau memproduksi banyak, kita bingung memasarkannya Tapi kita juga udah berupaya untuk mengajukan bantuan kepada Biro Pemberdayaan Perempuan, pihak Kecamatan Teluk Betung Selatan, pihak Kelurahan, dan Koran Harian untuk membantu melakukan promosi dan memfasilitasi dalam promosi." (Hasil wawancara 30 Juni 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"kami memproduksi kerajinan tangan dari olahan daur ulang sampah cuma seadanya. Kami nggak terbentur di modal, tapi kami terbentur dalam pemasarannya yang susah buat di distribusiin, kita udah coba bekerjasama dengan

pihak-pihak kecamatan dan lain-lain buat pemasarannya." (Hasil wawancara 30 Juni 2012)

Dari beberapa pendapat diatas menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan tetap dilakukan walaupun belum melakukan produksi secara besar sehingga belum sepenuhnya terwujud peningkatan ekonomi yang diharapkan karena masalah pemasaran yang terbilang susah bagi masyarakat pesisir. Namun Jaringan Perempuan Pesisir tetap mengupayakan dengan mengadakan kerjasama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan, pihak Kecamatan Teluk Betung Selatan, pihak Kelurahan, dan Koran Berita Harian untuk membantu melakukan promosi dan memfasilitasi dalam promosi.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan kegiatan peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah terus dikembangkan dengan melakukan pelatihan dengan bantuan dari pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan Jaringan Perempuan Pesisir. Adanya pelatihan yang diberikan juga ternyata mengundang masyarakat untuk mau berpartisipasi didalamnya. Sehingga adanya kelompok masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung yang mau mengikuti pelatihan berarti telah menunjukkan bahwa mereka mendukung adanya strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai tujuan untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan telah tercapai. Dalam hal ini pemberdayaan menunjuk pada prinsip pemberdayaan menurut Sullivan, dkk (Dalam Suharto 2010:68—69) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi bagi perubahan.

Beberapa bentuk kegiatan LSM Jaringan Perempuan Pesisir, yaitu gambar (18) menjelaskan LSM JPRP sedang melakukan pertemuan dengan salah satu Koran Berita Harian untuk menjalin kerjasama, gambar (19) menjelaskan bahwa LSM Jaringan Perempuan Pesisir sedang melakukan promosi hasil kerajinan tangan yang di fasilitasi dari hasil kerjasama. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan:

Gambar 18. Pertemuan Jaringan Perempuan Pesisir dengan salah satu Koran Berita Harian untuk menjalin kerjasama

Gambar 19. Promosi hasil kerajinan tangan yang di fasilitasi dari hasil kerjasama

Terkait strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah, maka peneliti akan memberikan analisis dan memberikan penilaian yang kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah, peneliti menilai bahwa perekonomian masyarakat menjadi satu tolok ukur kesejahteraan di tingkat komunitas masyarakat miskin pesisir. Bimbingan usaha bagi masyarakat menjadi sangat penting guna terwujudnya peningkatan kemampuan usaha masyarakat yang dapat bersaing dengan produksi-produksi usaha dari daerah lain, sehingga persaingan harga dapat terjamin disamping adanya upaya-upaya penciptaan usaha alternatif. Penciptaan usaha alternatif yang dilakukan di pesisir Kota Bandar Lampung adalah dengan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang lebih khususnya kepada kaum ibu rumah tangga melalui pengolahan daur ulang sampah sebagai alternatif pendapatan keluarga. Kegiatan ini mendorong peningkatan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan sampah organik dan anorganik untuk di daur ulang kembali sehingga hasil dari olahan sampah tersebut dapat dijadikan berbagai bentuk kerajinan tangan seperti kompos cair, kompos kering, bunga, pot bunga, dan tikar. Strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah ini diawali dan didukung oleh beberapa bentuk kegiatan yang diantaranya yaitu pelatihan yang mendatangkan fasilitator dari LSM Up-Link (*Urban Poor Linkage*) yang mengajarkan Jaringan

Perempuan Pesisir untuk bagaimana membuat olahan sampah menjadi kompos, kemudian dari kegiatan tersebut barulah di adakan pelatihan bagi masyarakat pesisir sehingga bukan hanya anggota saja yang memiliki kemampuan dalam hal pemberdayaan tetapi merata kepada seluruh masyarakat pesisir demi kemajuan masyarakat itu sendiri.

Upaya bersama yang telah dilakukan oleh masyarakat dan juga Jaringan Perempuan Pesisir dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan kegiatan pemberdayaan mengolah daur ulang sampah menjadi sangat penting mengingat ancaman sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang ada di lingkungan pesisir Kota Bandar Lampung semakin tinggi, serta semakin rentannya ancaman kerusakan lingkungan pesisir yang intensitasnya semakin meningkat akhir-akhir ini akibat semakin banyaknya pabrik-pabrik yang memberikan dampak buruk sehingga mencemari kawasan pesisir dengan sampah dan limbah yang mereka timbulkan. Kegiatan pemberdayaan dengan memanfaatkan sampah secara bijak diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis yang semakin tinggi bagi masyarakat sehingga nilai ekonomi dan ekologis bagi keseimbangan kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan selaras dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sesuai dengan konsep berfikik menurut Suharko (2005) bahwa Jaringan Perempuan Pesisir sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia berdasarkan kepentingan bersama, hobi, profesi, atau tujuan dalam kegiatan tertentu dengan tujuan partisipasi sosial dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pelayanan swadaya.

Dari berbagai pembahasan yang terkait dengan pelaksanaan strategi oleh Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengolahan daur ulang sampah, maka dapat disimpulkan bahwa adanya strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah menunjukkan adanya upaya mengoptimalkan manfaat produksi dari sampah yang tercemar di kawasan pesisir dengan manfaat positif lainnya yaitu semakin berkurangnya dampak kerusakan lingkungan sehingga membawa kondisi pesisir yang semakin dekat dengan kelestarian lingkungan pesisir kota Bandar Lampung.

Adanya berbagai kegiatan dan hasil yang telah tercapai dari adanya strategi peningkatan ekonomi melalui pengolahan daur ulang sampah yang ada di pesisir kota Bandar Lampung ini dapat dikatakan juga bahwa LSM Jaringan Perempuan Pesisir telah mampu membentuk masyarakat untuk mampu secara mandiri mengelola sampah yang tercemar untuk dijadikan suatu sumber daya yang ada sehingga hasil dari kemampuan mereka tersebut juga yang menciptakan sumber perekonomian bagi mereka. Hal ini mengarah pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Suharto 2010:58) yang menyatakan bahwa sebagai tujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri yang mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

B. Strategi Pelestarian Lingkungan Melalui Pengelolaan Mangrove

Sebagaimana diungkapkan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2010:58) menyatakan bahwa sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang diantaranya yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

Berkaitan dengan strategi pelestarian lingkungan, dalam pelaksanaanya LSM Jaringan Perempuan Pesisir berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat pesisir dalam memberikan pemahaman,

serta keterampilan kepada masyarakat agar mampu secara mandiri dalam melakukan proses dan pengelolaan pemberdayaan. Dengan adanya kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam proses dan pengelolaan pemberdayaan secara mandiri, akan mampu membawa mereka untuk bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Untuk membawa masyarakat agar dapat mencapai tujuan tersebut maka Jaringan Perempuan Pesisir mengupayakan dengan memberikan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) sehingga mereka dapat lebih cerdas dalam menanggapi persoalan yang menjadi beban hidup sehingga mereka dapat terbebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

Hasil dari adanya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia selama ini, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat pesisir akan kelestarian lingkungannya, selain itu pelatihan pengelolaan mangrove dilakukan sebagai satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pembibitan tanaman mangrove dan metode penanamnaya, kemudian manfaat dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia juga berdampak pada timbulnya kesadaran bagi masyarakat pesisir untuk tidak membuang sampah sembarangan di sekitaran laut, tetapi diarahkan untuk membuang sampah di rumah kompos agar sampah dapat di daur ulang oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan juga mengurangi dampak pencemaran laut pesisir.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat Chairul Saleh selaku Kepala Lingkungan I Kelurahan Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"sejak adanya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diadakan oleh Jaringan Perempuan Pesisir, saya merasa sangat terbantu dalam pemberdayaan untuk masyarakat sini. Adanya kegiatan tersebut mendorong masyarakat disini mau menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah tindakan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan melestarikan lingkungan ini menarik kalangan yang ada disini baik kalangan remaja dan anak-anak untuk ikut serta mendukung tindakan tersebut dengan tidak membuang sampah sembarangan dan benar-benar menjaga kelestarian lingkungan" (Hasil wawancara 4 Juli 2012)

Adanya kesadaran masyarakat pesisir serta pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi keselamatan hidup mereka menunjukkan bahwa Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir telah berhasil membawa mereka terbebas dari kebodohan. Dapat dikatakan terbebas dari kebodohan karena mereka telah mampu menerima dan memahami pelatihan yang dijalankan oleh Jaringan Perempuan Pesisir serta mengimplementasikannya dengan baik. Dan dampak dari adanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat masyarakat terbebas dari kesakitan.

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Dalam hai ini pemberdayaan sebagai tujuan mengandung pengertian bahwa dengan adanya pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

perlukan. Strategi pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir telah berhasil memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan dan pemahaman dalam melakukan pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove. Namun keberhasilan Jaringan Perempuan Pesisir dalam melakukan pemberdayaan melalui strategi pelestarian lingkungan ini belum sepenuhnya tercapai, hal tersebut terlihat dari sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan ekonominya belum terlihat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber-sumber produktif yang kaitannya dengan strategi pelestarian lingkungan disini adalah mangrove. Bibit mangrove yang ditanami oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat pesisir setempat tidak tumbuh dan rusak dikarenakan terjangan ombak laut, apabila bibit mangrove tersebut dapat tumbuh hingga saat ini menjadi pohon mangrove tentu saja pohon mangrove dapat dimanfaatkan hasilnya untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dari keterampilan untuk memanfaatkan buah dan daun mangrove, dari buah dan daun mangrove dapat dijadikan produk makanan dan minuman, kemudian membuat batik dengan motif dari bahan dasar tinta mangrove, dan masih banyak lagi manfaat pohon mangrove yang dapat dijadikan untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan pohon mangrove. Tentu saja sumber-sumber produktif tersebut belum dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan mereka karena bibit mangrove yang di tanami tersebut belum tumbuh hingga menjadi pohon mangrove. Terkait sumber-sumber produktif di ungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa:

"pelestarian kawasan lingkungan dengan menanem bibit mangrove nggak bisa dijadiin suatu program pemberdayaan yang bisa ningkatin perekonomian masyarakat dan ngelestariin lingkungan. Karena ya bibit yang kita tanemin itu gagal dan rusak karena terjangan ombak." (Hasil wawancara 4 Juli 2012)

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa potensi mangrove seharusnya dapat dijadikan sebagai suatu alternatif kerajinan yang akan di lakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, karena dengan adanya pemberdayaan melalui pemanfaatan mangrove akan berdampak pada kelestarian lingkungan di daerah pesisir Kota Bandar Lampung dan manfaat lain yang di dapat dari pelestarian mangrove ini akan berdampak pula pada meningkatnya perekonomian. Tetapi strategi pelestarian lingkungan melalui penanaman bibit mangrove ini dapat dikatakan belum berhasil sehingga masyarakat belum mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan berdasarkan tujuan yang berikutnya adalah mampu menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan. Dengan adanya kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan-keputusan akan membantu Jaringan Perempuan Pesisir dalam mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Jaringan Perempuan Pesisir adalah mewujudkan terpenuhinya hak-hak perempuan, kearifan lingkungan, dan tempat tinggal. Terwujudnya tatanan sosial, ekonomi, politik, lingkungan dan budaya wilayah pesisir yang adil

dan beradab yang ditandai dengan baiknya kualitas hidup rakyat, terbentuknya akses warga terhadap sumber daya, adanya partisipasi dan kekuasaan rakyat dalam pengambilan keputusan yang menentukan hidup dan masa depan, dan kuatnya kesadaran kritis.

Strategi pelestarian lingkungan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang dilakukan di pesisir Kota Bandar Lampung adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak (masyarakat, pemangku kepentingan, dan *stake holder*) yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Namun demikian, sifat akomodatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya bilamana perhatian kepada masyarakat diberikan porsi yang lebih besar. Untuk itu pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama bagi LSM Jaringan Perempuan Pesisir untuk melancarkan pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung.

Menurut Suharto (2010:58) mengungkapkan pengertian pemberdayaan sebagai tujuan, salah satunya adalah menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan terlihat dari kemampuan mereka dalam membuat suatu inisiatif kebijakan dalam proses kegiatan Penetapan Kawasan Perlindungan, dalam hal ini masyarakat memainkan peranan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan

sampai dengan pelaksanaannya. Terkait hal tersebut diungkapkan oleh Faisal selaku Penasehat Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa:

"dalam penetapan kawasan perlindungan daerah pesisir, masyarakat pesisir sangat berpartisipasi karena mereka sendiri yang punya inisiatif untuk nentuin daerah-daerah mana yang mau dijadikan kawasan perlindungan, partisipasi dan peran aktif mereka terlihat dari keterlibataan mereka dari proses pengambilan keputusan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatannya." (Hasil wawancara 11 Juli 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Peran aktif masyarakat sangat terlihat dalam nentuin daerah yang mau di jadiin daerah perlindungan, inisiatif masyarakat ini sendiri dikarenakan rasa empati mereka terhadap lingkungan tempat tinggalnya yang semakin hari semakin mengalami kerusakan, mereka takut kalau kerusakan yang sekarang pasti akan kena dan nambah parah pada anak cucu mereka nantinya." (Hasil wawancara 11 Juli 2012)

Dalam pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan di pesisir Kota Bandar Lampung, Jaringan Perempuan Pesisir menjalankan program pemberdayaan berbasis masyarakat sebagai pengelola langsung. Berkaitan dengan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove yang berbasis masyarakat telah diungkapkan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"untuk mempermudah kinerja Jaringan Perempuan Pesisir dalam mewujudkan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove, kami telah berinisiatif untuk melakukan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat. Disana kami bersama dengan masyarakat sebagai pengelola langsung. Masyarakat banyak ngasih masukan dan saran-saran, mereka juga saling bertukar pikiran untuk ngelestariin lingkungan pesisir sampe kita sepakatin program apa yang bakal kita jalanin." (Hasil wawancara 11 Juli 2012)

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan dan inisiatif masyarakat pesisir yang berperan aktif dalam upaya pelestarian

lingkungan melahirkan suatu kebijakan dalam proses penetapan kawasan perlindungan yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan dapat dikatakan cukup baik.

Berdasarkan berbagai pemaparan tentang hasil yang telah tercapai dari strategi pelestarian lingkungan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir, maka peneliti akan memberikan analisis dan memberikan penilaian yang kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Peneliti menilai bahwa adanya pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove ini bertujuan untuk meningkatkat kemandirian serta pemahaman masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung terhadap pentingnya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove dilakukan dan diawali dengan mengadakan program pengembangan sumber daya manusia, penetapan kawasan perlindungan, dan penanaman bibit mangrove. Adanya kegiatan tersebut menunjukan bahwa Jaringan Perempuan Pesisir sebagai LSM yang melakukan pemberdayaan di daerah pesisir Kota Bandar Lampung berupaya meningkatkan pengetahuan dan upaya penyadaran masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola sumber daya alam yang ada melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah diberikan oleh Jaringan Perempuan Pesisir. Memberikan pemberdayaan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi pelatihan dan motivasi merupakan bagian dari tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan dan berpartisipasi aktif sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumber daya pesisir termasuk dalam pengelolaan mangrove. Dalam hal ini, sesuai dengan

konsep berfikik menurut Suharko (2005) bahwa Jaringan Perempuan Pesisir sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia berdasarkan kepentingan bersama, hobi, profesi, atau tujuan dalam kegiatan tertentu dengan tujuan partisipasi sosial dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pelayanan swadaya.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Suharto (2010:58) menyatakan bahwa sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri yang mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Berdasarkan pendapat diatas bila dikaitkan dengan hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga telah tercapai dalam hal pemberdayaan masyarakat tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan, yaitu (1) masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu, mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Masyarakat dapat dikatakan terbebas dari kebodohan karena mereka telah mampu menerima dan memahami pelatihan yang dijalankan oleh Jaringan Perempuan Pesisir serta mengimplementasikannya dengan baik, serta manfaat lain dari adanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat masyarakat terbebas dari kesakitan. (2) masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung belum mampu untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Hal ini di nilai karena bibit mangrove yang ditanami oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat pesisir setempat tidak tumbuh dan rusak dikarenakan terjangan ombak laut, tentu saja sumber-sumber produktif tersebut belum dapat dikelola karena bibit mangrove yang di tanami tersebut belum tumbuh hingga menjadi pohon mangrove, sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya mencapai tujuan karena masyarakat belum mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. (3) masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung sudah mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang

berperan sebagai pengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung, hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam membuat suatu inisiatif kebijakan dalam proses kegiatan Penetapan Kawasan Perlindungan, dalam hal ini masyarakat memainkan peranan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan keadaan tersebut maka sebagai tujuan, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir terhadap masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung menunjuk pada keadaan perubahan sosial, yaitu masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung kini sudah berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan seperti memiliki kepercayaan diri yang mampu menyampaikan aspirasi dalam kegiatan pertemuan rutin yang dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir di pesisir Kota Bandar Lampung, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannnya. Tetapi strategi pelestarian lingkungan melalui pengelolaan mangrove ini dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, hal ini ditandai dengan tidak tercapainya tujuan kelestarian lingkungan dari pengelolaan mangrove karena bibit mangrove yang di tanami oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan masyarakat pesisir setempat tidak tumbuh atau rusak karena terjangan ombak laut, selain itu masyarakat juga belum mampu menjangkau sumber-sumber produktif dari mangrove itu sendiri yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan, dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Jaringan Perempuan Pesisir untuk melaksanakan strateginya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas Ibu Rumah Tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkungan organisasi. Faktor internal yang menjadi kendala LSM Jaringan Perempuan Pesisir sendiri antara lain adalah keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Jaringan Perempuan Pesisir dan kurang optimalnya pemasaran.

1. Keterbatasan kuantitas SDM organisasi

Faktor penghambat pertama yang terdapat dari dalam tubuh organisasi Jaringan Perempuan Pesisir adalah masalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

Hal ini dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kalau kendala dari kita sih memang ada mas, yang jadi kendala di organisasi sekarang ini adalah kita masih kurang ketersediaan sumber daya manusia di Jaringan Perempuan Pesisir dalam berorganiasi, anggota yang terliat bener-bener aktif di organisasi ini cuma lima puluh orangan." (Hasil wawancara 1 Agustus 2012)

Selanjutnya, Siti Kusuma Widyaningsih selaku Wakil Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Yang kitaorang rasain di organisasi Jaringan Perempuan Pesisir ini masih kekurangan orang-orang buat jadi anggota, sebenernya ya di bilang aktif nggak aktif sih mas, memang kalau buat ngumpul-ngumpul di sekret nggak banyak yang hadir, tapi kalau untuk ngejalanin programnya cukup banyak orang-orangnya yang aktif." (Hasil wawancara 1 Agustus 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhayati selaku Sekertaris LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kita keterbatasan di masalah sumber daya manusia, ahlinya memang udah ada, tapi jumlahnya yang masih kurang banyak, dan menurut saya ini salah satu dari kendala yang kami hadapin" (Hasil wawancara 1 Agustus 2012)

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas, peneliti dapat menilai bahwa dapat dikatakan salah satu faktor internal yang menjadi kendala LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga ini adalah masalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Jaringan Perempuan Pesisir. Saat ini Jaringan Perempuan Pesisir hanya memiliki sekitar 50 anggota saja yang benar-benar aktif dalam berorganisasi. Walaupun demikian, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terlihat anggota dan masyarakat yang cukup banyak dan antusias yang mengikuti.

2. Kurang optimalnya pemasaran

Faktor penghambat terakhir yang terdapat dari dalam tubuh organisasi Jaringan Perempuan Pesisir adalah masalah kurang optimalnya pemasaran dari hasil kegiatan pemberdayaan.

Hal ini dikemukakan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Ya jika berbicara kendala-kendala dalam pelaksanaan program di Jaringan Perempuan Pesisir ini sebenernya memang ada mas, itu contohnya kayak masalah pemasarannya dari hasil kerajinan tangan kami. Susah disini untuk ngejual ke luar karna kami nggak punya link buat jual keluar. Di dalem rapat Jaringan Perempuan Pesisir kemarin kami sempet ngebahas tentang koperasi, rencananya kami pingin membuat koperasi untuk nyalurin hasil kerajinan kami, tapi ini baru rencana, nanti di rapat selanjutnya mau kami bahas lagi lebih mendalam tentang koperasi tersebut" (Hasil wawancara 10 Agustus 2012)

Selanjutnya, Anggraini Agusta selaku Kordinator Balai LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Masalah pemasaran memang jadi hambatan buat kami, jelas saja karna dari penjualan itulah kami ngedapetin hasil atau uang untuk bantu-bantu penghasilan ekonomi keluarga. Kalau kerajinan tangan kami belum laku ya kami cuma bisa nunggu itu kejual dan sambil ngerjain terus supaya makin banyak yang kami produksi. Biasanya yang ngebeli barang-barang hasil kerajinan tangan kami ini ya warga-warga sini aja sama mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang penelitian disini mereka beli sama kami, terus mahasiswa juga suka beli dari kami kalau ada bazar-bazar gitu di kampusnya, mereka jual lagi barang itu di bazarnya, terus juga Biro Pemberdayaan Perempuan pernah beberapa kali untuk liat-liat program disini dan ngeborong hasil kerajinan tangan kami." (Hasil wawancara 10 Agustus 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Legirah selaku Anggota LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kita kesulitan untuk masalah pemasaran kerajinan kami, kami nggak punya uang banyak untuk ngebangun toko biar barang-barang kerajinan kami dijual disana" (Hasil wawancara 10 Agustus 2012)

Hal tersebut dibenarkan oleh Siti Hadiati selaku Anggota LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Iya dek, memang itu bener masalah penjualan dari kerajinan tangan kami ini termasuk susah. Apa ya.. ya mungkin orang diluaran sana nggak tau kalau di pesisir ini ada organisasi yang ngebuat-buat kerajinan tangan kayak organisasi kami, mungkin juga karna kami yang nggak punya keterampilan dalam hal penjualan. Pas itu di rapat sempet ngebahas pingin buat koperasi. Jadi masyarakat yang mau ngejual dari hasil kerajinan tangannya bisa di salurin ke koperasi unit desa itu, kan nggak kemana-mana kalau orang mau nyari, tinggal ke koperasi aja udah ada di sana semua hasil kerajinan kami. Terus untuk koperasi simpen pinjem itu juga mau biar warga pesisir disini bisa minjem uang dan nabung disini, yah mudah-mudahan ini bisa kelaksana biar kami mudah" (Hasil wawancara 10 Agustus 2012)

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas, peneliti dapat menilai bahwa dapat dikatakan faktor internal lain yang menjadi kendala LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga ini adalah masalah kurang optimalnya pemasaran dari hasil kegiatan pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena untuk memperoleh akses penjualan ke luar sulit untuk mereka dapatkan. Selain itu mereka juga tidak mempunyai dana yang lebih untuk membangun ataupun menyewa toko untuk memasarkan hasil kerajinan tangan dari pemberdayaan Jaringan Perempuan Pesisir. Kemudian lemahnya sumber daya manusia yang kurang terampil dalam menjual hasil karya kerajinan tangan Jaringan Perempuan Pesisir ini menjadi salah satu faktor juga dari kurang optimalnya pemasaran. Jadi, penjualan hasil karya kerajinan pemberdayaan Jaringan Perempuan Pesisir hanya sebatas penjualan di sekitaran daerah pesisir. Inilah salah satu penyebab yang membuat terhambatnya pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir oleh Jaringan Perempuan Pesisir.

Berbagai pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kendala internal diatas secara tidak langsung berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan dan pencapaian strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang menjadi kendala Pelaksanaan strategi LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat lokal tidak hanya berasal dari internal di dalam tubuh Jaringan Perempuan Pesisir saja, melainkan juga terdapat kendala-kendala yang berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi Jaringan Perempuan Pesisir. Adapun kendala-kendala yang terdapat dari luar organisasi Jaringan Perempuan Pesisir yang pertama adalah tidak adanya responsifitas pemerintah daerah setempat, kemudian yang kedua adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya lokal.

1. Tidak adanya responsifitas pemerintah daerah setempat

Faktor penghambat pertama yang terdapat diluar tubuh organisasi Jaringan Perempuan Pesisir adalah tidak adanya responsifitas pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir.

Hal ini dikemukakan oleh Suheni selaku Ketua RT 003 Lingkungan I Kelurahan Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"Kalau berbicara tentang kendala-kendala dari luar organisasi, yang terlihat untuk Jaringan Perempuan Pesisir ini dek, nggak pernah adanya sedikitpun perhatian

dan bantuan dari pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengakomodir program-program pemberdayaan masyarakat dari LSM Jaringan Perempuan Pesisir. Nggak adanya peran serta dan partisipasi langsung pemerintah untuk organisasi ini juga termasuk kendala buat masyarakat sini. Mungkin masyarakat sini kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang masih kurang respon sama kegiatan pemberdayaan yang dijalanin Jaringan Perempuan Pesisir." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Selanjutnya, Faisal selaku Penasehat LSM Jaringan Perempuan Pesisir menyatakan bahwa :

"Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung nggak pernah turut serta untuk kegiatan pemberdayaan kami. Apa yang kami lakukan disini semata-mata murni dari kami dan untuk kami juga, kami merasa bangga walaupun pemerintah seolah nggak mau tau tentang keberadaan kami tetapi apa yang kita bangun dan kita jalanin disini untuk kemajuan kami sendiri kearah yang lebih baik." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Darlena selaku Ketua LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kami Jaringan Perempuan Pesisir disini berdiri dari kemauan kami sendiri, dan dari berdirinya organisasi kami ini belum ada sedikitpun bantuan dari pemerintah daerah. Jangankan bantuan secara dana, ikut turun terjun langsung sekedar ngeliat kegiatan kamipun nggak pernah. Dulu kami pernah nyoba untuk minta dana buat kegiatan pemberdayaan kami, tapi banyak alesannya, dana anggarannya belum keluarlah, disuruh di oper ke bank disuruh lisinglah, udah ngurus di bank juga udah setahun lebih dananya nggak cair juga. Kami ini rakyat miskin, seharusnya pemerintah respon dengan keberadaan kami dan keberadaan organisasi kami, jangan cuma pas kampanye aja berani berkoar-koar mau ngesejahterain rakyat miskin pesisir, kami juga perlu bukti itu, orang-orang miskin kayak kami inilah yang perlu di sejahterain." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas, peneliti dapat menilai bahwa dapat dikatakan salah satu faktor eksternal yang menjadi kendala LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga ini adalah tidak adanya responsifitas pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh LSM Jaringan Perempuan Pesisir. Kurangnya

perhatian dari pihak pemerintah Kota Bandar Lampung terlihat dari bentuk ketidakmauan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat di pesisir. Pelaksanaan strategi LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat pesisir akan maksimal apabila pemerintah daerah turut serta dalam mendukung program pemberdayaan di wilayah pesisir.

2. Rendahnya kualitas sumber daya lokal

Faktor penghambat lain yang menjadi kendala dari luar tubuh organisasi Jaringan Perempuan Pesisir adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berada di daerah pesisir Kota Bandar Lampung.

Hal ini dikemukakan oleh Herni Musfi selaku Camat Teluk Betung Selatan yang menyatakan bahwa :

"Menurut saya mengenai kendala di luar organisasi yang berkenaan dengan LSM Jaringan Perempuan Pesisir adalah persoalan masyarakat pesisir yang mayoritasnya masih terkesan tidak sadar akan potensi yang mereka miliki dan cenderung setengah hati untuk menjaga dan melestarikan kawasan perairan pesisir. Kemudian adanya pendekatan pembangunan selama ini yang lebih menonjolkan pada pembangunan fisik, malah menjadikan masyarakat yang penuh ketergantungan dan merusak nilai-nilai masyarakat disana. Jadi yang terlihat selama ini masyarakat cenderung menjadi tidak mau pusing, tidak mau bertanya, menggunakan potensi dengan salah, tidak saling percaya, perasaan minder, tidak ingin maju, tidak ada kesadaran, kurang kreatif, dan mementingkan diri sendiri sehingga keadaan inilah yang membuat rendahnya kualitas dan kapasitas mereka." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Selanjutnya, Endang Kasmayadi selaku Lurah Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"Memang pada kenyataannya wilayah pesisir ini mengalami pencemaran lingkungan karena sampah yang menumpuk di sepanjang bibir pantai, tapi Jaringan Perempuan Pesisir ini mampu ngerubah limbah tersebut sebagai potensi, namun demikian yang sangat disayangkan tidak semua masyarakat pesisir yang menganggap hal ini sebagai sebuah potensi, ini semua karena minimnya pengetahuan masyarakat pesisir sini yang memang notabenenya masyarakat miskin." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Selanjutnya, Suheni selaku Ketua RT 3 Lingkungan 1 Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

"Penghambat dari kegiatan pemberdayaan disini juga dikarenakan pengetahuan masyarakat yang rendah dan masih kaku untuk menerima perubahan." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Faisal selaku Penasehat LSM Jaringan Perempuan Pesisir yang menyatakan bahwa :

"Kendala yang kami hadapi ya masih seputar masalah kondisi masyarakat yang kaku dan bersikap kurang sadar akan maksud dan keberadaan Jaringan Perempuan Pesisir ini. Seperti yang kita lihat dan kita ketahui bahwa masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung mayoritasnya masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, tidak banyak dari masyarakat yang berpenghasilan besar, bisa di liat dari pekerjaan mereka yang kebanyakan buruh dan nelayan. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi mengenyam pendidikan yang tinggi, sekolahpun nggak bisa tinggi-tinggi, paling tinggi juga paling cuma sampe bangku SMA. Inilah kenapa kalau masyarakat pesisir nggak cukup berkualitas sumber daya manusianya." (Hasil Wawancara, 10 September 2012)

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas, peneliti dapat menilai bahwa dapat dikatakan faktor eksternal lain yang menjadi kendala LSM Jaringan Perempuan Pesisir dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga ini adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya lokal. Rendahnya kualitas sumber daya lokal di pesisir dikarenakan

minimnya pengetahuan masyarakat yang bersifat umum, khususnya tentang pentingnya kelestarian kawasan lingkungan di daerah pesisir Kota Bandar Lampung. Pelaksaan strategi LSM Jaringan Perempuan Pesisir belum optimal karena sulitnya memberikan pemahaman kepada sebagian masyarakat tentang arti penting pengolahan dan pemanfaatan sampah yang dijadikan sebagai suatu potensi oleh Jaringan Perempuan Pesisir, masyarakat masih terkesan tidak sadar akan potensi yang dimiliki dan cenderung setengah hati untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan pesisir. Selain hal tersebut, adanya pendekatan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pembangunan fisik ternyata hanya menghasilkan masyarakat yang penuh ketergantungan dan merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Saat ini nilai-nilai yang dimiliki masyarakat cenderung menjadi tidak mau pusing, tidak mau bertanya, menggunakan potensi dengan salah, tidak saling percaya, perasaan minder, tidak ingin maju, tidak ada kesadaran, kurang kreatif, dan mementingkan diri sendiri. Keadaan ini mengakibatkan terbatasnya cara berpikir masyarakat untuk maju dan berkembang lebih dari apa yang telah dimiliki sekarang, akibat dari semua itu munculnya sikap-sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak bersatu sehingga sangat mudah sekali untuk diperdaya oleh orang lain. Berbagai pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kendala eksternal diatas secara tidak langsung berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan dan pencapaian strategi pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis komunitas ibu rumah tangga melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir.

Beberapa gambar terkait wawancara yang di lakukan oleh peneliti, yaitu gambar (20) menjelaskan bahwa peneliti sedang melakukan wawancara dengan Camat

Teluk Betung Selatan, gambar (21) menjelaskan bahwa peneliti sedang melakukan wawancara dengan Lurah Bumi Waras, gambar (22) menjelaskan bahwa peneliti sedang melakukan wawancara dengan Ketua RT 3 Kelurahan Bumi Waras. Berikut adalah beberapa gambar prosesw wawancara oleh peneliti:

Gambar 20. Wawancara dengan Camat Teluk Betung Selatan

Gambar 21. Wawancara dengan Lurah Bumi Waras

Gambar 22. Wawancara dengan Ketua RT 5